

Membangun Kerjasama Strategis Berbagai Pihak Untuk Perubahan Masyarakat Refleksi Pengalaman KKN Menggunakan Metode ABCD

Andini Rofi'ah Qurotul'Ain¹, Nadhir Salahuddin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Andini Rofi'ah Qurotul'Ain

E-mail: andinirofiahqurotulain@gmail.com

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukosari Lor, Kabupaten Bondowoso, merupakan bentuk pengabdian masyarakat berbasis Asset-Based Community Development (ABCD) yang menekankan penguatan kemitraan strategis antar pihak. Program ini bertujuan mengembangkan potensi lokal melalui sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, BUMDes, pelaku UMKM, dan masyarakat dalam pengelolaan rest area desa. Pendekatan ABCD dilaksanakan melalui enam tahapan, yaitu inkulturasi, discovery, dream, design, define, dan destiny. Setiap tahap difokuskan pada peningkatan partisipasi, pemetaan aset lokal, dan kolaborasi lintas sektor. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan rest area, terbentuknya kelompok pengelola berbasis masyarakat, serta forum komunikasi yang memperkuat kerja sama antara warga dan pemerintah desa. Selain menghasilkan perubahan fisik, program ini juga mendorong transformasi sosial berupa tumbuhnya rasa kepemilikan, kepercayaan, dan gotong royong antar pihak. Melalui penerapan metode ABCD, kegiatan KKN ini membuktikan bahwa kolaborasi strategis menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pembangunan desa berbasis aset lokal.

Kata kunci - KKN, pemberdayaan masyarakat, kemitraan strategis, metode ABCD, rest area desa

Abstract

The Community Service Program (KKN) in Sukosari Lor Village, Bondowoso Regency, is a form of community service based on Asset-Based Community Development (ABCD) that emphasizes strengthening strategic partnerships between parties. This program aims to develop local potential through synergy between students, the village government, Village-Owned Enterprises (BUMDes), MSMEs, and the community in managing village rest areas. The ABCD approach is implemented through six stages: inculturation, discovery, dream, design, define, and destiny. Each stage focuses on increasing participation, mapping local assets, and cross-sector collaboration. The results of the activity show an increase in public awareness of rest area cleanliness and management, the formation of community-based management groups, and a communication forum that strengthens cooperation between residents and the village government. In addition to producing physical changes, this program also encourages social transformation in the form of a growing sense of ownership, trust, and mutual cooperation between parties. Through the application of the ABCD method, this KKN activity demonstrates that strategic collaboration is an important foundation for the sustainability of village development based on local assets.

Keywords - KKN, community empowerment, strategic partnership, ABCD method, village rest area

PENDAHULUAN

Tantangan terbesar dalam kegiatan pendampingan masyarakat seperti *Kuliah Kerja Nyata* (KKN) adalah membangun kerja sama yang strategis di antara berbagai pihak (Qorib 2024). Padahal, keberhasilan program pengabdian masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kegiatan yang dilakukan, tetapi juga oleh seberapa kuat hubungan dan sinergi antar aktor yang terlibat. Dalam konteks pembangunan sosial, kemitraan menjadi aspek penting karena tidak ada satu pihak pun yang memiliki semua sumber daya, pengetahuan, dan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat secara menyeluruh (Sutapa, N. Paramananda, and Widhiyanti 2024).

Kegiatan KKN merupakan salah satu bentuk *experiential learning* yang menggabungkan unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN, mahasiswa diharapkan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga belajar memahami dinamika sosial dan membangun kolaborasi dengan masyarakat lokal (Thomson, Waterson, and Chatterjee 2024). Namun, dalam praktiknya, membangun kerja sama yang efektif sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika melibatkan berbagai pihak dengan latar belakang, kepentingan, dan cara pandang yang berbeda (Zogara and Umiyati 2025). Karena itu, membangun kemitraan strategis menjadi kebutuhan utama dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada perubahan sosial berkelanjutan (Nirwana and Muhlis 2025).

Kegiatan KKN di Desa Sukosari Lor, Kabupaten Bondowoso, menjadi refleksi nyata dari pentingnya kemitraan strategis. Desa ini memiliki potensi lokal yang menjanjikan melalui keberadaan *rest area* yang terletak di jalur utama, dekat dengan masjid dan pusat aktivitas warga. Sayangnya, potensi tersebut belum terkelola dengan optimal. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan masih rendah, pengelolaan fasilitas belum terkoordinasi, dan sinergi antara BUMDes, pelaku UMKM, serta pemerintah desa masih lemah (Syata et al. 2025). Situasi ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan desa tidak hanya bergantung pada sumber daya fisik, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial dan kemampuan berbagai pihak untuk bekerja sama.

Dalam teori pembangunan masyarakat, Menurut *Bahan Ajar, Membangun Kemitraan (partnership)* didefinisikan sebagai hubungan yang dibangun oleh dua pihak atau lebih yang memiliki visi, misi, dan tujuan bersama untuk saling melengkapi sumber daya yang dimiliki (Tim 2018). Kemitraan merupakan strategi penting dalam konteks pembangunan, karena memungkinkan terjadinya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil (Paulina 2023). Melalui kerja sama yang berbasis pada kepercayaan dan saling menguntungkan (*mutual benefit*), program pemberdayaan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kemitraan strategis berbeda dari kerja sama biasa karena melibatkan nilai strategis, inovasi, dan orientasi jangka panjang. (Austin and Seitanidi 2012) menjelaskan bahwa kemitraan strategis memiliki ciri-ciri utama: adanya tujuan bersama yang jelas, komunikasi dua arah yang terbuka, pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang, serta komitmen terhadap hasil jangka panjang. Dalam konteks KKN, kemitraan strategis dapat terlihat dari kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, BUMDes, dan pelaku UMKM yang bersama-sama merancang pengelolaan *rest area* bukan hanya untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran sosial masyarakat.

Keuntungan dari membangun kemitraan strategis cukup signifikan. Melalui sinergi antar pihak, kegiatan pengabdian mampu menciptakan rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, dan memperluas dampak sosial ekonomi. Selain itu, kemitraan juga membantu memperkuat jejaring sosial (*social capital*), yang menjadi fondasi penting bagi masyarakat desa dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan adanya kemitraan yang solid, partisipasi masyarakat meningkat, dan keberlanjutan program menjadi lebih terjamin meskipun kegiatan KKN telah berakhir.

Namun, proses membangun kemitraan strategis di tingkat desa bukanlah hal yang sederhana. Banyak faktor penghambat yang muncul, mulai dari perbedaan kepentingan, rendahnya kesadaran partisipatif, hingga lemahnya komunikasi antar pihak (Subekti and Irma Fitriana Ulfah 2023). Dalam

pelaksanaan KKN di Desa Sukosari Lor, misalnya, mahasiswa menghadapi dinamika internal dalam kelompok, kurangnya koordinasi antara pihak desa dan pelaku usaha, serta perbedaan cara pandang tentang pengelolaan *rest area*. Tantangan lain juga muncul dari keterbatasan fasilitas dan kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemitraan strategis memerlukan proses negosiasi, penyesuaian, dan pembelajaran sosial yang berkelanjutan (Subekti and Irma Fitriana Ulfah 2023).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, kegiatan KKN ini menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini berfokus pada pengenalan dan pemanfaatan potensi atau aset lokal sebagai titik awal perubahan, bukan pada kekurangan atau masalah yang ada. Pendekatan ABCD mengajarkan bahwa setiap komunitas memiliki kekuatan yang dapat dikembangkan apabila diberikan ruang partisipasi yang cukup. Hal ini sesuai dengan semangat kemitraan strategis, di mana setiap pihak berkontribusi berdasarkan keunggulan masing-masing.

Dalam implementasinya, pendekatan ABCD dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni inkulturasi, *discovery*, *dream*, *design*, *define*, dan *destiny*. Tahap inkulturasi dilakukan dengan menjalin kedekatan dan membangun kepercayaan dengan masyarakat serta pemerintah desa. Tahap *discovery* digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan aset yang dimiliki desa, seperti semangat gotong royong, kemampuan UMKM, dan dukungan perangkat desa. Tahap *dream* dilakukan dengan mengajak masyarakat bermimpi bersama tentang pengelolaan *rest area* yang bersih dan produktif. Kemudian, tahap *design* dan *define* digunakan untuk merancang langkah nyata, seperti pembuatan papan informasi, penghijauan, dan sosialisasi kebersihan. Terakhir, tahap *destiny* menjadi refleksi dan aksi keberlanjutan agar masyarakat terus bergerak setelah kegiatan KKN selesai.

Tulisan ini merupakan refleksi dari pengalaman pelaksanaan KKN di Desa Sukosari Lor yang berfokus pada pengelolaan *rest area* melalui pembangunan kemitraan strategis antar pihak. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana kemitraan strategis dibangun, apa saja tantangan yang dihadapi dalam prosesnya, serta bagaimana pendekatan ABCD dapat memperkuat kolaborasi dan memberdayakan masyarakat. Melalui refleksi ini, diharapkan muncul pemahaman baru tentang pentingnya sinergi antar pihak dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis aset untuk mencapai perubahan sosial yang berkelanjutan.

METODE

1. Inkulturasi (Pengenalan dan Pembentukan Kepercayaan)

Tahap awal dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas masyarakat untuk memahami kebiasaan, nilai sosial, dan sistem kerja warga desa. Mahasiswa berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, kerja bakti, dan musyawarah desa untuk membangun kepercayaan sosial (*social trust*). Proses ini menjadi dasar bagi pembentukan kemitraan strategis antar pihak. Menurut (Hazin, Setiawan, and Rahmawati 2024), tahap inkulturasi penting dalam penerapan ABCD karena melalui interaksi langsung, masyarakat merasa dihargai dan lebih terbuka terhadap perubahan. Selama tahap ini, mahasiswa juga mendokumentasikan catatan lapangan, yang kemudian menjadi bahan awal dalam mengenali dinamika sosial dan hubungan antar lembaga seperti BUMDes dan perangkat desa.

2. Discovery (Menemukan Aset dan Potensi Lokal)

Pada tahap ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terfokus dengan perangkat desa, pelaku UMKM, dan warga sekitar *rest area*. Tujuannya untuk menemukan aset dan potensi lokal yang dapat dikembangkan. Ditemukan bahwa Desa Sukosari Lor memiliki aset fisik berupa lokasi *rest area* strategis, aset manusia berupa pelaku UMKM dengan keterampilan kerajinan lokal, serta aset sosial berupa semangat gotong royong. Tahapan ini sesuai dengan hasil penelitian (Agustina 2024) yang menjelaskan bahwa *asset mapping* dalam ABCD tidak hanya mendata potensi fisik, tetapi juga mengidentifikasi hubungan sosial dan nilai budaya masyarakat yang menjadi dasar pemberdayaan. Selain wawancara, mahasiswa juga

mendokumentasikan hasil observasi melalui foto, video, dan catatan visual lokasi aset desa, seperti kondisi *rest area*, fasilitas publik, serta kegiatan ekonomi warga. Dokumentasi ini membantu mengonfirmasi hasil wawancara dan memperkuat analisis potensi lokal.

3. Dream (Merumuskan Impian dan Harapan Bersama)

Tahap *dream* dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (*FGD*) yang melibatkan mahasiswa, perangkat desa, BUMDes, dan pelaku UMKM. *FGD* ini menjadi sarana menggali impian dan harapan masyarakat tentang masa depan *rest area* desa. Dalam kegiatan ini, masyarakat berpartisipasi aktif menyampaikan keinginan agar *rest area* menjadi ruang publik yang bersih, menarik, dan menjadi pusat ekonomi lokal. (Hazin, Setiawan, and Rahmawati 2024) menegaskan bahwa tahapan *dream* pada ABCD menumbuhkan motivasi kolektif karena masyarakat diajak membayangkan masa depan positif berdasarkan kekuatan yang mereka miliki. Selama pelaksanaan *FGD*, mahasiswa melakukan pencatatan hasil diskusi dan dokumentasi foto kegiatan, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam tahap perencanaan program. Hasil *dreaming session* ini juga membantu memperkuat kerja sama antar pihak dengan menyepakati visi bersama.

4. Design (Merancang Program Bersama)

Tahap ini merupakan penerjemahan hasil impian ke dalam rencana aksi nyata. Berdasarkan *FGD*, disepakati program utama meliputi:

- a. Pembuatan media promosi digital untuk UMKM
- b. Pembuatan papan informasi dan petunjuk arah *rest area*;
- c. Penanaman tanaman hias dan pemanfaatan bahan daur ulang, dan
- d. Membersihkan lingkungan *rest area* bersama pelaku umkm dan perangkat desa

Selama tahap *design*, mahasiswa mendokumentasikan notulen rapat, rancangan kegiatan sebagai bentuk bukti keterlibatan masyarakat. (Fathoni and Khoiriyah 2023) menegaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam perancangan program adalah kunci keberlanjutan kegiatan berbasis ABCD. Di tahap ini, mahasiswa berperan sebagai fasilitator kreatif yang menghubungkan ide masyarakat dengan konsep teknis.

5. Define (Penetapan Tindakan dan Pembagian Peran)

Tahap *define* dilakukan melalui rapat koordinasi dan wawancara tindak lanjut untuk menetapkan pembagian peran antar pihak. Pemerintah desa bertindak sebagai fasilitator dan penyedia sarana, BUMDes berperan dalam koordinasi pelaku UMKM, sedangkan mahasiswa menjadi pendamping teknis. (Kurniawan et al. 2024) menyatakan bahwa kepemimpinan partisipatif dan kejelasan peran merupakan faktor utama dalam memastikan keberhasilan implementasi metode ABCD di masyarakat. Proses penetapan ini didokumentasikan melalui notulen rapat dan surat kesepakatan kegiatan, yang menjadi bukti formal kerja sama lintas pihak. Tahapan ini memperkuat semangat kemitraan strategis karena semua pihak memahami tanggung jawab dan kontribusinya masing-masing.

6. Destiny (Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program)

Tahap akhir adalah implementasi dan evaluasi kegiatan. Mahasiswa bersama masyarakat melaksanakan Pembuatan media digital, penataan *rest area*, dan membersihkan *rest area*. Selama pelaksanaan, dilakukan observasi langsung dan dokumentasi untuk memantau keterlibatan warga dan efektivitas program. Setelah kegiatan selesai, dilakukan wawancara dengan warga dan pelaku UMKM guna menilai dampak kegiatan. (Ridhani and Priyadharma 2023) menjelaskan bahwa tahap *destiny* bertujuan memperkuat kemandirian masyarakat agar hasil kegiatan dapat berlanjut tanpa pendamping eksternal. Hasil evaluasi menunjukkan terbentuknya kelompok warga pengelola *rest area* yang bekerja sama dengan BUMDes, sebagai bukti nyata keberlanjutan program dan terjalannya kerja sama strategis antar pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) di Desa Sukosari Lor menunjukkan bagaimana pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan berfokus pada kekuatan dan aset lokal. Pendekatan ini tidak lagi memandang masyarakat sebagai pihak yang kekurangan, tetapi sebagai pemilik potensi yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi strategis. Dalam konteks pengabdian ini, masyarakat berperan aktif dalam merancang dan mengelola kegiatan bersama, terutama dalam upaya memperkuat pengelolaan *rest area* desa. (Kurniawan et al. 2024) menjelaskan bahwa implementasi ABCD menuntut pemimpin dan fasilitator untuk mampu memobilisasi aset sosial dan ekonomi lokal agar terbentuk sinergi antara sumber daya manusia, lembaga, dan lingkungan.

Tahap awal pelaksanaan program menunjukkan pentingnya membangun kepercayaan sosial sebelum memulai kegiatan. Mahasiswa KKN berusaha mendekati masyarakat melalui kegiatan informal dan dialog ringan untuk memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan (Mujahiddin, Tanjung, and Saputra 2023) yang menegaskan bahwa keberhasilan pemberdayaan berbasis komunitas bergantung pada *sinergitas sosial* antara pemerintah, komunitas, dan pihak eksternal. Di Sukosari Lor, proses *trust building* ini menjadi titik awal bagi terbentuknya komunikasi yang terbuka antara mahasiswa, masyarakat, dan perangkat desa, sehingga mendorong munculnya inisiatif bersama untuk menata *rest area* sebagai aset publik.



Gambar 1.

Proses Pendekatan Kepada Masyarakat

Kegiatan pemetaan potensi di Desa Sukosari Lor menjadi langkah penting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Melalui pemetaan ini, tim KKN bersama pemerintah desa berusaha mengenali kondisi desa secara menyeluruh, baik dari sisi wilayah, fasilitas, maupun potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dari hasil pemetaan tersebut, tidak hanya terlihat aset-aset seperti jalan, sekolah, atau BUMDes, tetapi juga potensi sosial dan ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan. Peta ini kemudian dijadikan dasar untuk menyusun strategi pengelolaan *rest area* agar dikelola secara bersama-sama antar masyarakat, pemerintah desa, dan BUMDes. Seperti yang dijelaskan oleh (Firdaus and Djuwita 2024), penerapan metode ABCD memang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak agar pengelolaan aset bisa memberi manfaat sosial dan ekonomi. Jadi, keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya dilihat dari banyaknya aset yang ada, tetapi dari seberapa baik masyarakat bisa bekerja sama memanfaatkan potensi yang mereka miliki.



Gambar 2.

Pemetaan Potensi Wilayah Desa Sukosari Lor dengan Perangkat Desa

Seiring berjalannya program, pola interaksi antara masyarakat dan lembaga desa mengalami perubahan. Pemerintah desa mulai berperan sebagai fasilitator dan pendukung, bukan sebagai pelaksana tunggal, sementara BUMDes berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal yang menjembatani antara warga dan kebijakan desa. Pola kemitraan ini mencerminkan praktik *governance* kolaboratif yang diuraikan oleh (Nasfiza, Erlinda, and Supentri 2024) di mana keberhasilan program desa ditentukan oleh kemampuan setiap aktor untuk berbagi peran dan tanggung jawab dalam sistem yang setara. Melalui proses FGD dengan masyarakat, masyarakat mulai memahami pentingnya mengelola ruang publik secara bersama untuk kepentingan jangka panjang.



Gambar 3.

FGD kepada Pemerintah Desa dan Bumdes terkait Perencanaan Program KKN



Gambar 4.

FGD dengan Pemrintah Desa dan Bumdes bersama Masyarakat terkait tentang Rest Area

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Perubahan yang terjadi tidak bersifat instan, tetapi menunjukkan kemajuan bertahap dalam cara masyarakat berkolaborasi. Masyarakat terutama pelaku UMKM rest area mulai terlibat secara sukarela dalam kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan, meskipun belum terorganisir secara rutin. Pemerintah desa dan BUMDes telah menunjukkan komitmen untuk mendukung kegiatan lanjutan, tetapi partisipasi penuh pelaku UMKM masih memerlukan pendampingan berkelanjutan. (Nurussa'adah, Erfina, Devi Wening Astari 2023) menjelaskan bahwa tantangan utama dalam pengembangan kemitraan masyarakat melalui BUMDes terletak pada kesinambungan koordinasi dan perencanaan bersama antar pelaku ekonomi desa. Dalam konteks Sukosari Lor, hal ini tercermin dari masih perlunya forum koordinasi rutin untuk menjaga semangat kolaboratif pasca-KKN.



Gambar 5.

Pemerintah desa, Bumdes dan Tim KKN dan Masyarakat Melakukan Perubahan Terhadap Rest Area

Mahasiswa dalam kegiatan ini berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat, pemerintah desa, dan pelaku usaha lokal. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai fasilitator dialog dan pendamping proses belajar masyarakat. (Firdaus and Djuwita 2024) menegaskan bahwa peran akademisi dalam pendekatan ABCD adalah menguatkan kapasitas reflektif masyarakat agar mampu mengenali potensi dan mengorganisasi tindakan kolektif. Pendekatan ini terlihat berhasil ketika warga mulai menunjukkan inisiatif untuk memelihara dan menata ulang *rest area* tanpa ketergantungan pada mahasiswa.

Meskipun capaian kegiatan belum dapat dikatakan sempurna, kemajuan yang terjadi menunjukkan arah transformasi sosial yang positif. Terbentuknya forum komunikasi antara masyarakat, BUMDes, dan pemerintah desa menandai munculnya mekanisme kolaborasi baru di tingkat lokal. Proses ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pengabdian masyarakat tidak harus diukur dari hasil akhir, tetapi dari keberlanjutan proses sosial yang sedang tumbuh. Sebagaimana ditegaskan oleh (Mujahiddin, Tanjung, and Saputra 2023), keberlanjutan pemberdayaan komunitas sangat bergantung pada komitmen antar aktor untuk terus menjaga dialog dan partisipasi. Dengan demikian, penerapan pendekatan ABCD di Desa Sukosari Lor dapat dianggap berhasil secara prosedural karena telah menciptakan dasar sosial bagi kemitraan strategis yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kegiatan KKN di Desa Sukosari Lor yang menerapkan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya diukur dari hasil akhir, melainkan dari proses sosial yang terbangun selama pelaksanaannya. Melalui tahapan mulai dari *inkulturasi* hingga *destiny*, tercipta hubungan kolaboratif antara mahasiswa, masyarakat, pemerintah desa, BUMDes, serta pelaku UMKM yang didasari kepercayaan dan keterbukaan.

Temuan penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya sebagai inti dari proses pemberdayaan. Kemitraan strategis bukan sekadar bentuk kerja sama praktis, tetapi suatu hubungan jangka panjang yang berlandaskan rasa saling percaya, pembagian peran yang seimbang, serta komitmen bersama dalam mengembangkan potensi lokal desa. Melalui sinergi ini, setiap pihak mampu saling melengkapi dan menciptakan nilai bersama (*shared value*) yang memperkuat jejaring sosial serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan desa.

Dampak positif yang terlihat meliputi meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan rest area, terbentuknya kelompok pengelola berbasis warga, serta lahirnya forum komunikasi lintas sektor. Walaupun masih terdapat kendala seperti perbedaan kepentingan dan keterbatasan sumber daya, dinamika tersebut justru menjadi proses pembelajaran sosial menuju kerja sama yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal agar pola kemitraan strategis yang telah terbangun dapat terus berkembang dan menjadi contoh praktik kolaboratif berbasis aset lokal di wilayah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Lisa. (2024.) ABCD (Asset Based Communities Development): Legalitas Dan Pengembangan Potensi Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah (UMKM) Telor Asin Desa Pagelaran. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4(1): 180–82.
- Austin, J. E., & Seitanidi, M. M. (2012). Collaborative value creation: A review of partnering between nonprofits and businesses: Part I. Value creation spectrum and collaboration stages. *Nonprofit and voluntary sector quarterly*, 41(5), 726-758.
- Fathoni, M. I. A., & Khoiriyah, S. (2023). Pemanfaatan media digital dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah desa Prayungan dengan metode ABCD (Asset Based Community Development). *Jurnal Solma*, 12(3), 1237-1246.
- Firdaus, I. A. F., & Djuwita, A. (2024). Analisis Asset Based Community Development Pada Program Kemitraan Csr (Klaster Digital Umk) Pt Telkom Indonesia. *eProceedings of Management*, 11(2).
- Hazin, M., Setiawan, A. C., & Rahmawati, N. W. D. (2023). Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan sentra tanaman obat keluarga (TOGA) dengan model ABCD di desa Jemundo. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 27-35.
- Kurniawan, F. H., Santoso, B., Sobandi, A., Maulana, M. A., & Fitriana, G. D. (2024). Implementasi Asset Based Community Development: Strategi Peran Pemimpin dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis Circular Economic pada Unit Usaha Syariah. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(1), 197-216.
- Tanjung, Y., & Saputra, S. (2023). Sinergitas Pemerintah dan Komunitas Desa Dalam Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Deli Serdang. *Sospol*, 9(2), 261-272.
- Nasfiza, Y., Erlinda, S., & Supentri, S. (2024). Efektivitas Efektivitas Kerjasama Antara Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo Kerjasama Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Sentajo. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4752-4758.
- Nirwana, N., & Muhlis, M. (2024). Pelatihan Pembuatan Makanan Berbahan Lokal Sebagai Upaya

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Kassi dengan Model Assets Based Community Development (ABCD). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasyyiatul Aisyiyah Sulawesi Selatan (JPMNAS)*, 4(2), 87-101.
- Nurussa'adah, E., Astari, D. W., & Ashari, W. M. (2024). Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Guna Mencapai SDGS Desa di Era Digital. *Jurnal Abdi Insani*, 11(1), 64-72.
- Paulina, A. M. (2023). Kemitraan Civil Society Dan Pemerintah Dalam Program Sekolah Ramah Anak Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrative Reform*, 11(2).
- Qorib, F. (2024). Tantangan dan peluang kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam program pengabdian di Indonesia. *Journal of Indonesian Society Empowerment*, 2(2), 46-57.
- Ridhani, M. Y., & Priyadharma, A. A. (2023). Asset based community development sebagai penunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Barito Kuala. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, 18(1), 261-280.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2023). Collaborative Governance Pada Bumdes Ketapanrame Kabupaten Mojokerto. *Journal of Governance Innovation*, 5(1), 161-174.
- Sutapa, I. N., Paramananda, N. P. N., & Widhiyanti, A. A. S. (2024). Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat dalam Peningkatan Keberlanjutan Usaha dengan Digitalisasi pada kelompok pembudidaya Ikan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(4), 2583-2593.
- Syata, W. M., Ilham, M., Nia, M., Lewa, M. J., Sabillah, B. M., & Rosmalia, A. (2025). Kolaborasi untuk Kemajuan: Transformasi Budaya, Pendidikan, Ekonomi, dan Pertanian di Desa Arongo. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 2(1), 66-73.
- Thomson, L. J. M., Waterson, H., & Chatterjee, H. J. (2024). Successes and challenges of partnership working to tackle health inequalities using collaborative approaches to community-based research: mixed methods analysis of focus group evidence. *International Journal for Equity in Health*, 23(1), 135.
- Tim, Pengembang. 2018. *Bahan Ajar Kemitraan*. Banjarbaru: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau Kemendikbud. https://repositori.kemdikbud.go.id/18558/1/Bahan_Ajar_Membangun_Kemitraan.pdf.
- Zogara, L. U., & Umiyati, H. (2025). Kolaborasi Trisektor dalam Pengabdian Masyarakat: Mahasiswa, Kampus, dan Perusahaan Berbagi untuk Anak Yatim. *Jurnal KKN Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 20-25.